



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI
DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. meningkatkan fungsi pemerintahan Desa;
- b. meningkatkan kapasitas aparatur Desa;
- c. meningkatkan ketersediaan infrastruktur prasarana dan sarana Desa; dan
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan daya saing.

BAB III ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Sumber Dana dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa

Pasal 4

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD sebesar 10,73% (sepuluh koma tujuh tiga persen) dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang diterima Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Rumus Perhitungan Alokasi Dana Desa

Pasal 5

- (1) Rumus perhitungan ADD kabupaten adalah sebagai berikut:

Pagu ADD = $10,73\% \times (\text{DAU} + \text{DBH})$

Keterangan:

Pagu ADD = Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten

DAU = Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten

DBH = Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten.

- (2) Rumus perhitungan ADD yang diterima suatu Desa adalah sebagai berikut:

$$\text{ADD per Desa} = \frac{\text{Pagu ADD} - (\text{SilTap} + \text{Tunj. BPD}) + (\text{SilTap Desa} + \text{Tunj. BPD})}{229}$$

Keterangan:

ADD per Desa = jumlah pagu ADD Desa di Kabupaten.

SilTap = jumlah pengasilan tetap aparat Desa se-Kabupaten.

Tunj. BPD = jumlah tunjangan BPD se-kabupaten.

SilTap Desa = jumlah penghasilan tetap aparat Desa di Desa yang bersangkutan.

Tunj. BPD Desa = jumlah tunjangan BPD di Desa yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Jumlah ADD yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp78.039.795.760,00 (tujuh puluh delapan miliar tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (2) ADD setiap Desa di Daerah untuk tahun anggaran 2025 dialokasikan berdasarkan:
- a. total jumlah penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD; dan
 - b. selisih pagu ADD se-kabupaten dengan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD se-kabupaten yang dibagi secara merata kepada 229 (dua ratus dua puluh sembilan) Desa.

Pasal 7

- (1) Besaran ADD setiap Desa dihitung dengan cara:
- a. menghitung terlebih dahulu penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD; dan
 - b. menghitung selisih total ADD dengan total penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditambah tunjangan BPD dan dibagi secara merata kepada 229 (dua ratus dua puluh sembilan) Desa.
- (2) Besaran ADD untuk masing-masing Desa pada Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 8

- (1) Penggunaan ADD dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.

- (2) ADD dipergunakan untuk:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD; dan
 - b. membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Penggunaan ADD setelah dikurangi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD, digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyaluran dan Pencairan Dana

Pasal 9

- (1) Penyaluran dan pencairan ADD dilakukan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan ADD pada tahun berjalan, maka penyalurannya akan diperhitungkan pada tahap berikutnya atau tahun berikutnya jika telah ditetapkan perubahannya dalam APBD tahun berkenaan.

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dilaksanakan setiap bulan dalam tahun berkenaan.
- (2) Besaran ADD setiap bulan adalah 1/12 (satu per dua belas) dari besaran ADD setiap Desa.
- (3) Penyaluran ADD dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa dilaksanakan berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati dengan melampirkan APB Desa tahun anggaran berkenaan dan laporan ADD tahun anggaran atau bulan sebelumnya dari Kepala Desa.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD setiap triwulan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

BAB V
SANKSI

Pasal 12

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran ADD pada bulan Januari dalam hal:
 - a. Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan kepada Bupati dan tidak menyampaikan realisasi penggunaan ADD tahun sebelumnya; dan
 - b. adanya rekomendasi penundaan.

- (2) Bupati menunda penyaluran ADD setiap bulan dalam hal Kepala Desa belum menyampaikan laporan penggunaan ADD sampai dengan bulan sebelumnya dalam tahun berjalan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Camat dan secara operasional dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara fungsional dilakukan oleh perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 6 Januari 2025
PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

SULASTRI H. I. RASYID

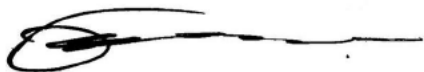
Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 6 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PETRUS PEDO MARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
Pembina Tk.I
19780426 200212 1 007

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN ADD
 DAN BESARAN ADD UNTUK SETIAP
 DESA TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	ALOKASI DANA DESA
1	2	3	4
I	Wulanggitang	53.06.01	3,872,861,840
	1. Ojandetun	53.06.01.2001	322,890,640
	2. Hewa	53.06.01.2002	344,490,640
	3. Waiula	53.06.01.2003	368,757,040
	4. Nawokote	53.06.01.2007	393,023,440
	5. Boru	53.06.01.2008	417,289,840
	6. Pululera	53.06.01.2009	344,490,640
	7. Nileknoheng	53.06.01.2011	322,890,640
	8. Hokeng Jaya	53.06.01.2012	320,224,240
	9. Pantai Oa	53.06.01.2013	322,890,640
	10. Boru Kedang	53.06.01.2014	382,223,440
11. Klatanlo	53.06.01.2021	333,690,640	
II	Titehena	53.06.02	4,927,799,360
	1. Kobasoma	53.06.02.2001	333,690,640
	2. Lewolaga	53.06.02.2002	368,757,040
	3. Lewoingu	53.06.02.2003	357,957,040
	4. Tuakepa	53.06.02.2004	357,957,040
	5. Tenawahang	53.06.02.2005	382,223,440
	6. Leraboleng	53.06.02.2006	393,023,440
	7. Serinuho	53.06.02.2007	333,690,640
	8. Watowara	53.06.02.2008	441,556,240
	9. Konga	53.06.02.2009	333,690,640
	10. Ile Gerong	53.06.02.2010	322,890,640
	11. Adabang	53.06.02.2011	382,223,440
	12. Dun Tana Lewoingu	53.06.02.2012	322,890,640
	13. Duli Jaya	53.06.02.2013	298,624,240
14. Bokang Wolomatang	53.06.02.2014	298,624,240	
III	Larantuka	53.06.03	702,447,680
	1. Mokantarak	53.06.03.2019	368,757,040
	2. Lamawalang	53.06.03.2020	333,690,640
IV	Ile Mandiri	53.06.04	2,820,590,720
	1. Wailolong	53.06.04.2001	344,490,640
	2. Lewoloba	53.06.04.2002	368,757,040
	3. Tiwatobi	53.06.04.2003	368,757,040
	4. Watotutu	53.06.04.2004	344,490,640
	5. Riangkemie	53.06.04.2005	368,757,040
	6. Lewohala	53.06.04.2006	368,757,040
	7. Halakodanuan	53.06.04.2007	322,890,640
	8. Mudakeputu	53.06.04.2008	333,690,640
V	Tanjung Bunga	53.06.05	5,565,447,040
	1. Lewobunga	53.06.05.2006	322,890,640
	2. Sinamalaka	53.06.05.2007	382,223,440

	3. Ratulodong	53.06.05.2008	393,023,440
	4. Sinarhadigala	53.06.05.2009	347,157,040
	5. Bahinga	53.06.05.2010	357,957,040
	6. Waibao	53.06.05.2011	393,023,440
	7. Lamatutu	53.06.05.2012	357,957,040
	8. Latonliwo	53.06.05.2013	298,624,240
	9. Kolaka	53.06.05.2015	357,957,040
	10. Bandona	53.06.05.2016	347,157,040
	11. Nusa Nipa	53.06.05.2017	322,890,640
	12. Patisira Walang	53.06.05.2018	393,023,440
	13. Gekengderan	53.06.05.2020	322,890,640
	14. Aransina	53.06.05.2021	322,890,640
	15. Latonliwo Dua	53.06.05.2022	322,890,640
	16. Lamanabi	53.06.05.2023	322,890,640
VI	Solor Barat	53.06.06	4,482,736,160
	1. Tanah Lein	53.06.06.2002	347,157,040
	2. Lamaole	53.06.06.2003	298,624,240
	3. Kalelu	53.06.06.2004	298,624,240
	4. Nuhalolon	53.06.06.2005	298,624,240
	5. Balaweling II	53.06.06.2007	347,157,040
	6. Balaweling I	53.06.06.2008	322,890,640
	7. Pamakayo	53.06.06.2009	322,890,640
	8. Ongalereng	53.06.06.2012	357,957,040
	9. Karawatung	53.06.06.2013	322,890,640
	10. Lamawohong	53.06.06.2014	322,890,640
	11. Daniwato	53.06.06.2015	298,624,240
	12. Lewot Tanah Ole	53.06.06.2017	298,624,240
	13. Titehena	53.06.06.2019	322,890,640
	14. Lewonama	53.06.06.2020	322,890,640
VII	Solor Timur	53.06.07	5,769,672,080
	1. Watanhura	53.06.07.2002	322,890,640
	2. Lebao	53.06.07.2003	347,157,040
	3. Watohari	53.06.07.2004	357,957,040
	4. Motonwutun	53.06.07.2005	333,690,640
	5. Watobuku	53.06.07.2006	368,757,040
	6. Labelen	53.06.07.2007	322,890,640
	7. Menanga	53.06.07.2008	333,690,640
	8. Lohayong I	53.06.07.2009	347,157,040
	9. Wulublolong	53.06.07.2010	357,957,040
	10. Liwo	53.06.07.2011	322,890,640
	11. Tanah Werang	53.06.07.2012	322,890,640
	12. Lewohedo	53.06.07.2013	347,157,040
	13. Lohayong II	53.06.07.2014	368,757,040
	14. Watanhura II	53.06.07.2016	347,157,040
	15. Lewogeka	53.06.07.2017	322,890,640
	16. Lamawai	53.06.07.2018	322,890,640
	17. Kawuta	53.06.07.2019	322,890,640
VIII	Adonara Barat	53.06.08	5,841,765,120
	1. Duanur	53.06.08.2008	333,690,640
	2. Bukit Seburu I	53.06.08.2010	322,890,640
	3. Waiwadan	53.06.08.2011	344,490,640
	4. Danibao	53.06.08.2012	357,957,040
	5. Pajinian	53.06.08.2013	298,624,240
	6. Ile Pati	53.06.08.2014	322,890,640
	7. Wureh	53.06.08.2015	322,890,640
	8. Tonuwotan	53.06.08.2016	322,890,640

	9. Hurung	53.06.08.2017	322,890,640
	10. Bugalima	53.06.08.2019	322,890,640
	11. Homa	53.06.08.2021	322,890,640
	12. Bukit Seburu II	53.06.08.2024	357,957,040
	13. Kimakamak	53.06.08.2026	322,890,640
	14. Watobaya	53.06.08.2030	347,157,040
	15. Nimun Danibao	53.06.08.2032	322,890,640
	16. Waitukan	53.06.08.2033	298,624,240
	17. Woloklibang	53.06.08.2035	298,624,240
	18. Riangpadu	53.06.08.2036	298,624,240
IX	Wotan Ulumado	53.06.09	4,157,885,280
	1. Wailebe	53.06.09.2001	322,890,640
	2. Wotan Ulumado	53.06.09.2002	347,157,040
	3. Nayubaya	53.06.09.2003	322,890,640
	4. Oyangbarang	53.06.09.2004	382,223,440
	5. Kawela	53.06.09.2005	393,023,440
	6. Klukengnuking	53.06.09.2006	368,757,040
	7. Pandai	53.06.09.2007	357,957,040
	8. Bliko	53.06.09.2008	322,890,640
	9. Samsoge	53.06.09.2009	322,890,640
	10. Tobilota	53.06.09.2011	347,157,040
	11. Tana Tukan	53.06.09.2012	347,157,040
	12. Demondei	53.06.09.2013	322,890,640
X	Adonara Timur	53.06.10	6,485,586,160
	1. Dawataa	53.06.10.2003	322,890,640
	2. Terong	53.06.10.2004	344,490,640
	3. Bilal	53.06.10.2005	322,890,640
	4. Lamahala Jaya	53.06.10.2006	417,289,840
	5. Waiburak	53.06.10.2007	368,757,040
	6. Narasaosina	53.06.10.2008	298,624,240
	7. Karinglamalouk	53.06.10.2009	382,223,440
	8. Tuawolo	53.06.10.2010	322,890,640
	9. Kiwangona	53.06.10.2011	368,757,040
	10. Tapobali	53.06.10.2012	322,890,640
	11. Lewobunga	53.06.10.2013	382,223,440
	12. Beloto	53.06.10.2014	322,890,640
	13. Ipi Ebang	53.06.10.2015	347,157,040
	14. Lamalota	53.06.10.2016	322,890,640
	15. Puhu	53.06.10.2017	322,890,640
	16. Kwaelaga Lamawato	53.06.10.2018	322,890,640
	17. Gelong	53.06.10.2019	322,890,640
	18. Lelen Bala	53.06.10.2020	322,890,640
19. Saosina	53.06.10.2021	347,157,040	
XI	Kelubagolit	53.06.11	4,093,219,680
	1. Redontena	53.06.11.2001	333,690,640
	2. Adobala	53.06.11.2002	322,890,640
	3. Hinga	53.06.11.2003	357,957,040
	4. Lamapaha	53.06.11.2004	322,890,640
	5. Sukutokan	53.06.11.2005	333,690,640
	6. Nisakarang	53.06.11.2006	347,157,040
	7. Muda	53.06.11.2007	322,890,640
	8. Horinara	53.06.11.2008	368,757,040
	9. Pepakgeka	53.06.11.2009	357,957,040
	10. Lambunga	53.06.11.2010	368,757,040
	11. Mangaaleng	53.06.11.2012	333,690,640
	12. Keluwain	53.06.11.2019	322,890,640

XII	Witihama	53.06.12	5,382,115,840
	1. Watololong	53.06.12.2001	322,890,640
	2. Tuagoetobi	53.06.12.2002	368,757,040
	3. Weranggere	53.06.12.2003	322,890,640
	4. Oringbele	53.06.12.2004	368,757,040
	5. Watoone	53.06.12.2005	368,757,040
	6. Lamabelawa	53.06.12.2006	333,690,640
	7. Pledo	53.06.12.2007	344,490,640
	8. Lewopulo	53.06.12.2008	322,890,640
	9. Sandosi	53.06.12.2009	368,757,040
	10. Balaweling	53.06.12.2010	322,890,640
	11. Tobitika	53.06.12.2011	322,890,640
	12. Riangduli	53.06.12.2012	322,890,640
	13. Waiwuring	53.06.12.2013	322,890,640
	14. Baobage	53.06.12.2014	322,890,640
	15. Lamaleka	53.06.12.2015	322,890,640
	16. Balaweling Noten	53.06.12.2016	322,890,640
XIII	Ile Boleng	53.06.13	6,953,369,040
	1. Bedalewun	53.06.13.2001	322,890,640
	2. Nihaone	53.06.13.2002	322,890,640
	3. Lewobelolong	53.06.13.2003	322,890,640
	4. Bungalawan	53.06.13.2004	322,890,640
	5. Lamawolo	53.06.13.2005	357,957,040
	6. Helanlangowuyo	53.06.13.2006	368,757,040
	7. Lewopao	53.06.13.2007	393,023,440
	8. Gayak	53.06.13.2008	322,890,640
	9. Boleng	53.06.13.2009	333,690,640
	10. Neleblolong	53.06.13.2010	322,890,640
	11. Duablolong	53.06.13.2011	322,890,640
	12. Lewokeleng	53.06.13.2012	322,890,640
	13. Nelelamawangi	53.06.13.2013	322,890,640
	14. Harubala	53.06.13.2014	322,890,640
	15. Nelelamadike	53.06.13.2015	333,690,640
	16. Lamabayung	53.06.13.2016	322,890,640
	17. Lewat	53.06.13.2017	322,890,640
	18. Dokeng	53.06.13.2018	322,890,640
	19. Bayuntaa	53.06.13.2019	322,890,640
	20. Nobo	53.06.13.2020	322,890,640
	21. Nelelamawangi Dua	53.06.13.2021	322,890,640
XIV	Demon Pagong	53.06.14	2,343,833,680
	1. Lamika	53.06.14.2001	371,423,440
	2. Watotika Ile	53.06.14.2002	322,890,640
	3. Lewokluok	53.06.14.2003	382,223,440
	4. Blepanawa	53.06.14.2004	322,890,640
	5. Kawalelo	53.06.14.2005	322,890,640
	6. Bama	53.06.14.2006	322,890,640
	7. Lewomuda	53.06.14.2007	298,624,240
XV	Lewolema	53.06.15	2,610,898,480
	1. Ile Padung	53.06.15.2001	357,957,040
	2. Bantala	53.06.15.2002	417,289,840
	3. Sinar Hading	53.06.15.2003	393,023,440
	4. Painapang	53.06.15.2004	368,757,040
	5. Baluk Herin	53.06.15.2005	417,289,840
	6. Riangkotek	53.06.15.2006	333,690,640
	7. Lewobebe	53.06.15.2007	322,890,640

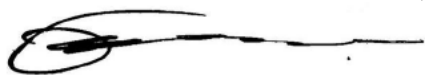
XVI	Ile Bura	53.06.16	2,263,035,280
	1. Riangbaring	53.06.16.2001	322,890,640
	2. Lewotobi	53.06.16.2002	344,490,640
	3. Nurabelen	53.06.16.2003	309,424,240
	4. Nobo	53.06.16.2004	344,490,640
	5. Lewoawang	53.06.16.2005	344,490,640
	6. Dulipali	53.06.16.2006	298,624,240
	7. Riang Rita	53.06.16.2007	298,624,240
XVII	Adonara	53.06.17	2,825,923,520
	1. Sagu	53.06.17.2001	393,023,440
	2. Kolimasang	53.06.17.2002	368,757,040
	3. Kolilanang	53.06.17.2003	368,757,040
	4. Tikatukan	53.06.17.2004	333,690,640
	5. Nisa Nulan	53.06.17.2005	347,157,040
	6. Lamahoda	53.06.17.2006	357,957,040
	7. Adonara	53.06.17.2007	357,957,040
	8. Kolipetung	53.06.17.2008	298,624,240
XVIII	Adonara Tengah	53.06.18	4,467,309,520
	1. Horowura	53.06.18.2001	333,690,640
	2. Kokotobo	53.06.18.2002	333,690,640
	3. Lite	53.06.18.2003	357,957,040
	4. Kenotan	53.06.18.2004	368,757,040
	5. Nubalema	53.06.18.2005	322,890,640
	6. Wewit	53.06.18.2006	357,957,040
	7. Lewobebe	53.06.18.2007	347,157,040
	8. Baya	53.06.18.2008	347,157,040
	9. Bidara	53.06.18.2009	347,157,040
	10. Oesayang	53.06.18.2010	347,157,040
	11. Hoko Horowura	53.06.18.2011	322,890,640
	12. Lewopao	53.06.18.2012	322,890,640
	13. Nubalema Dua	53.06.18.2013	357,957,040
XIX	Solor Selatan	53.06.19	2,473,299,280
	1. Kelike	53.06.19.2001	357,957,040
	2. Kelike Aimatani	53.06.19.2002	357,957,040
	3. Sulengwaseng	53.06.19.2003	347,157,040
	4. Kenere	53.06.19.2004	347,157,040
	5. Lemanu	53.06.19.2005	357,957,040
	6. Lewoggaran	53.06.19.2006	347,157,040
	7. Bubuatagamu	53.06.19.2007	357,957,040
Jumlah			78,039,795,760

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

SULASTRI H. I. RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya/
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON

Pembina Tk.I

19780426 200212 1 007